



Website:

ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak

***Correspondence:**

Khalida.utami@univpancasila.ac.id

DOI: 10.22219/jrak.v12i2.21444

Citation:

Utami, K., Amyulianthy, R., & Astuti, T. (2022). Pelaporan Yang Terintegrasi Di Rev. 4.0: Apakah BumN Di Indonesia? *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2),276-293.

Article Process

Submitted:

June 13, 2022

Reviewed:

July 15, 2022

Revised:

August 18, 2022

Accepted:

August 19, 2022

Published:

August 31, 2022

Office:

Department of Accounting
University of
Muhammadiyah Malang
GKB 2 Floor 3.
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, East Java,
Indonesia

P-ISSN: 2615-2223

E-ISSN: 2088-0685

Article Type: Research Paper

PELAPORAN YANG TERINTEGRASI DI REV. 4.0: SIAPKAH BUMN DI INDONESIA?

Khalida Utami, S.E., M.Sc^{1*}, Rafrini Amyulianthy, S.E.,
M.S.Ak., CA., CMA², Tri Astuti, SE., MM., Ak., CA³

Affiliation:

^{1,2,3}Faculty of Economic and Business, Universitas Pancasila

ABSTRACT

Integrated reporting has been proposed as a solution to the problem of misleading information in company reports, but its implementation has not been fully realized because regulations in each country regarding the implementation of corporate reporting in the form of IR are both mandatory and voluntary. The research proposes to assess Indonesia's readiness to apply IR among State-Owned Enterprises (SOE), and whether IR can be used as mandatory or voluntary disclosure. This study employs a quantitative approach that begins with data analysis on state-owned enterprises that issued annual reports on the Indonesia Stock Exchange. At a later stage, the overall score is calculated and evaluated with sensitivity analysis. The study finds the higher the amount of disclosure of firms implementing IR in Indonesia, the lesser the information gap obtained which can lead to a more effective corporate governance system. This research has implications for companies in considering the application of integrated reporting in making decisions related to investments both in the short and long term, so that they can support the company's sustainable development strategy.

KEYWORDS: Company performance; financial reports; integrated reporting; State-owned Enterprise.

INTRODUCTION

277

Revolusi Industri 4.0 (Rev. 4.0) menuntut perusahaan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan sosial secara cepat. Rev.4.0 mengisyaratkan semakin luasnya lingkup pelaporan keuangan dan kebutuhan akan informasi yang semakin meningkat. *Integrated reporting* (IR) muncul sebagai dampak dari adanya krisis keuangan global tahun 2008 yang menyebabkan meningkatnya permintaan atas pelaporan non-keuangan (Utami, 2016). IR memainkan peran kunci dalam pengendalian manajemen dan hubungan dengan stakeholder. Sebagai konsekuensi dari “pemikiran terintegrasi”. IR menggabungkan akuntansi keuangan tradisional dengan keberlanjutan dan masalah yang terkait dengan tata kelola perusahaan untuk meningkatkan kegunaan keputusan pelaporan pada bisnis modern (Velte & Stawinoga, 2017). Transparansi atas pengungkapan menjadi semakin penting sebagai akibat dari tuntutan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam konteks tata kelola perusahaan dan informasi non-keuangan (Wulf et al., 2014).

Afrika Selatan sebagai Negara pertama yang menerapkan IR sebagai pengungkapan wajib bagi perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Johannesburg sejak tahun 2010. Tahun 2013 *International Integrated Reporting Council* (IIRC) yang didukung oleh Global Reporting Initiatives (GRI) menerbitkan *Integrated reporting framework* sebagai panduan dalam menyusun laporan tahunan berbasis IR. Dengan diterbitkannya panduan tersebut, jumlah perusahaan yang telah menerapkan pelaporan dalam bentuk IR meningkat (Velte & Stawinoga, 2017). Hal ini memberikan bukti bahwa sudah saatnya untuk perusahaan beralih dari pelaporan keuangan tradisional menjadi pelaporan yang terintegrasi. Tetapi, regulasi setiap Negara berbeda-beda terkait dengan penerapan IR dalam pelaporan perusahaan. Sehingga, hal ini memunculkan pertanyaan apakah IR dibutuhkan sebagai pengungkapan wajib atau sukarela?

Pelaporan keuangan yang terintegrasi muncul sebagai dampak dari adanya asumsi tradisional yang keliru oleh perusahaan bahwa Bumi menyediakan sumber daya alam yang tidak terbatas dan memiliki kapasitas kekal dalam menyerap limbah pembuangan, akibatnya perusahaan hanya berfokus pada sebatas mengejar keuntungan ekonomi tanpa mempedulikan eksternalitas negatif bagi kondisi sosial dan lingkungan hidup (Azzahra, 2022). Krisis alam dan sosial ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dunia terhadap pentingnya menerapkan asas pembangunan keberlanjutan dalam segala aspek kehidupan, salah satunya dengan mengubah model bisnis agar selaras dengan konsep pembangunan keberlanjutan. Kemampuan perusahaan dalam mengukur keberhasilan jangka panjang dengan mengaplikasikan strategi pembangunan berkelanjutan dengan melakukan integrasi melalui *integrated reporting* yang dapat diakses secara terbuka oleh publik.

Di Indonesia telah mengatur terkait dengan perkembangan pelaporan perusahaan dengan adanya UU Nomor 40 tahun 2007 yang mengatur tentang perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *corporate social responsibility* (CSR). Tetapi kegiatan ini tidak sepenuhnya memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan banyak yang lebih mengarah pada *greenwashing* atau sarana pemasaran bagi perusahaan (Breliastiti, 2021). Hal ini dapat terjadi karena disebabkan oleh tidak adanya sebuah instrument pelaporan yang terukur dan akuntabel. Permasalahan ini menyebabkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK No.51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Berdasarkan peraturan tersebut, penerapan *integrated reporting* dapat digunakan sebagai penunjang dalam pembangunan berkelanjutan dan menjadi sebuah kewajiban yang spesifik dan mengikat bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Pelaksanaan *integrated reporting* saat ini masih bersifat sukarela, berarti belum ada regulasi yang mengatur secara resmi bahwa laporan tahunan harus berpedoman pada *Integrated Reporting Framework*. Namun, perusahaan dapat menggunakan *integrated reporting framework* sebagai salah satu acuan dalam penyusunan laporan tahunan. Pengungkapan sukarela sendiri akan mengurangi asimetri yang dapat terjadi antara divisi dalam hal manajemen perusahaan (Ahmad & Sari, 2017; Dosinta et al., 2018; Suttipun & Bomlai, 2019).

Penelitian ini menggunakan BUMN sebagai objek penelitian yang merupakan perusahaan yang mudah dipengaruhi oleh regulasi pemerintah. BUMN termasuk dalam perusahaan publik yang mayoritas pemilik sahamnya adalah pemerintah, sehingga perusahaan akan sangat berpengaruh dengan perubahan regulasi dan peran pemerintah dalam pengambilan keputusan salah satunya terkait dengan pelaporan perusahaan (Hapsari et al., 2019). BUMN dapat dijadikan sebagai *pioneer* di Indonesia dalam penerapan *integrated reporting*, sehingga penelitian ini bertujuan untuk melihat kesiapan BUMN yang terdaftar dalam bursa efek Indonesia dalam menerapkan *integrated reporting* baik secara mandatori atau voluntari. Penelitian ini juga memanfaatkan momentum dalam menganalisis penerapan IR dan hubungannya terhadap tata kelola perusahaan BUMN di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan secara teoritis dan juga berdampak bagi perbaikan pada implementasi. Sehingga penelitian ini berasumsi dengan menerapkan *Integrated Reporting* sebagai aturan wajib dapat memberikan manfaat yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas laporan.

Kajian Terdahulu

Pelaporan perusahaan baru-baru ini menjadi isu hangat di kalangan akademisi dan profesional (Ivan, 2018). Hubungan antara tata kelola perusahaan dan penggunaan *Integrated Reporting* (IR) dalam pelaporan perusahaan telah dikaji (Ahmad & Sari, 2017; Cooray et al., 2020; Roxana-Ioana & Petru, 2017; Suttipun & Bomlai, 2019; Wulf et al., 2014; Zambon et al., 2019).

Cooray et al. (2020) mengeksplorasi mekanisme tata kelola dalam memengaruhi kualitas IR di perusahaan publik Sri Lanka dengan membangun indeks untuk mengukur kualitas IR. Berdasarkan teori keagenan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem tata kelola perusahaan memiliki dukungan terbatas untuk memberikan informasi yang berkualitas kepada pemangku kepentingan tentang proses penciptaan nilai melalui IR, dengan pengecualian ukuran dewan dan ketersediaan risiko terpisah. Temuan ini menyiratkan bahwa direktur kurang menekankan pada penyampaian informasi berkualitas melalui teknik pengungkapan sukarela seperti IR. Studi lain yang sejalan mengungkapkan bahwa rendahnya kualitas IR disebabkan oleh kurangnya informasi yang diberikan tentang permodalan, model bisnis, dan tujuan strategis yang tidak diungkapkan perusahaan dalam IR (Pistoni et al., 2018).

Keberhasilan implementasi IR akan berdampak pada beberapa struktur dan proses bisnis, yang berarti dapat membantu organisasi dalam memenuhi standar tata kelola sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam menangani prinsip-prinsip utama IR. Hal ini didukung oleh Ahmad and Sari (2017) dan Suttipun and Bomlai (2019) yang menemukan bahwa IR memberikan sinyal yang baik kepada perusahaan dari para pemangku kepentingan atas informasi yang diungkapkan dalam IR.

Beberapa model teoritis telah dikembangkan untuk menjelaskan hubungan antara pemerintahan dan IR. Salah satu teori yang sangat jelas dalam menjelaskan hubungan ini adalah teori legitimasi, yang mengasumsikan bahwa pengungkapan sukarela dimaksudkan untuk memodelkan kesesuaian dengan nilai-nilai dan harapan publik. Teori legitimasi

memiliki potensi besar dalam menjelaskan hubungan antara strategi pengungkapan perusahaan dan faktor-faktor seperti laporan keuangan, implikasi strategis, dan pasar modal (Kannenbergh & Schreck, 2019). Selanjutnya jika dikaitkan dengan teori keagenan, pengungkapan perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai solusi dalam menangani masalah keagenan. Munculnya konflik keagenan dalam hubungan antara principal dan agen jika tidak ada keseimbangan informasi diantara mereka (asimetri informasi), hal ini disebabkan karena investor belum tentu memiliki informasi yang sama dengan manajemen yang memiliki akses langsung terhadap kegiatan bisnis perusahaan (Alkausar et al., 2021). Dimungkinkan untuk menggabungkan semua informasi yang diperlukan untuk semua pemangku kepentingan dengan memasukkan IR ke dalam pelaporan perusahaan, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal (Perego et al., 2016; Pistoni et al., 2018).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan IR dapat mempengaruhi proses bisnis perusahaan dan mengubah tradisi atau budaya perusahaan (Menicucci, 2018; Wulf et al., 2014). Camilleri (2018) menyatakan bahwa pengadopsian IR tidak akan memicu cara radikal atau inovatif dalam mengungkapkan item, tetapi lebih merupakan bentuk pelaporan yang secara bertahap dari pelaporan berkelanjutan sebelumnya. Farneti et al. (2019) menunjukkan bahwa perusahaan yang investornya lebih aktif dalam masalah lingkungan dan sosial dapat menerapkan IR secara lebih konsisten. Ketika perusahaan mengungkapkan adanya kepemilikan institusional, tingginya kuantitas dewan direksi akan memicu meningkatkan pengawasan agar dapat memaksimalkan kinerja manajemen. Pengawasan yang baik ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan pengelolaan yang baik sehingga dapat mempengaruhi perusahaan dalam menyusun laporan keuangan yang terintegrasi dan hasilnya akan lebih baik yang sesuai dengan prinsip *corporate governance* (Feng et al., 2017; Schmidt & Fahlenbrach, 2017).

Berkenaan dengan penjelasan teoritis dan temuan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengajukan hipotesis yang akan diuji adalah *corporate governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas implementasi IR pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia.

METHOD

Desain Penelitian dan Teknik Analisis Data

Penelitian dengan metode kuantitatif ini bertujuan untuk menguji hubungan antara tata kelola perusahaan dan pelaporan terintegrasi. Penelitian ini fokus pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pendekatan *purposive sampling* digunakan untuk memilih sampel yang dapat mewakili kriteria, seperti BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, menerbitkan laporan tahunan antara 2018 dan 2020, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan dalam bentuk laporan keberlanjutan atau laporan terintegrasi untuk tiga tahun sebelumnya. Kriteria penelusuran menghasilkan 20 BUMN yang akan menjadi subyek penelitian ini.

Gambar 1 berikut menunjukkan indikator *good corporate governance* yang diproyeksikan mempengaruhi penerapan *integrated reporting*. Berdasarkan pada gambar 1 tersebut, bahwa tahap awal yang dapat dilakukan yaitu melakukan analisis terhadap seluruh variabel yang diteliti dengan menggunakan analisis deskriptif. Selanjutnya, pengujian hipotesis terhadap model penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dan melakukan interpretasi terhadap analisis tersebut. Syarat dilakukannya analisis regresi berganda adalah setiap data harus lolos pengujian asumsi klasik.

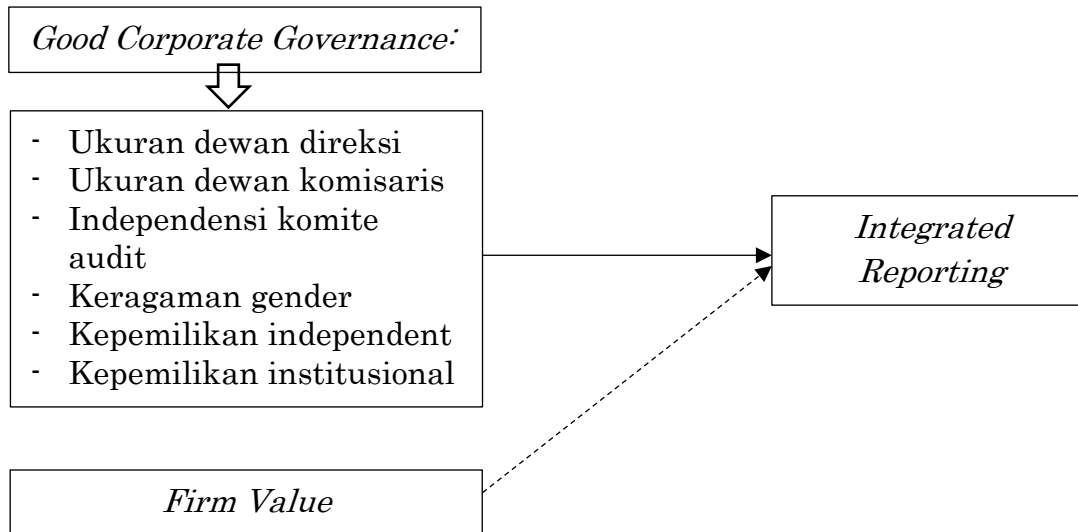


Figure 1. Model Penelitian

Selanjutnya analisis lebih lanjut dilakukan dengan menganalisis kesiapan perusahaan BUMN di Indonesia dalam penerapan *integrated reporting* dalam pelaporan perusahaannya. Hasil pengujian dengan menggunakan analisis regresi yang menguji pengaruh antara *good corporate governance* terhadap penerapan *integrated reporting* dapat menghasilkan dukungan terhadap analisis deskriptif terkait dengan kesiapan perusahaan BUMN dalam penerapan *integrated reporting*.

Instrumen Penelitian

Variabel penelitian ini meliputi variabel independen yaitu *good corporate governance* (GCG) dan nilai perusahaan, serta variabel dependen yang yakni pelaporan terintegrasi. Ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, independensi komite audit, keragaman *gender*, *gender* CEO, kepemilikan independen, dan kepemilikan institusional merupakan indikator-indikator yang termasuk dalam variabel independen. Uraian berikut menjelaskan secara rinci cara mengukur masing-masing variabel tersebut:

Pelaporan terintegrasi (*Integrated Reporting*)

Pelaporan terintegrasi adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manajemen perusahaan dan pemangku kepentingan untuk membahas proses penciptaan nilai perusahaan, dan mengacu pada seberapa banyak informasi yang diungkapkan perusahaan dalam pelaporan keuangannya. Alat ukur kualitas IR yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan kerangka pelaporan terintegrasi yang dikembangkan IIRC. Kerangka pelaporan terintegrasi mengkategorikan informasi pelaporan terintegrasi ke dalam delapan kategori sebagai berikut: gambaran organisasi dan lingkungan eksternal, tata kelola, model bisnis, risiko, peluang, dan pengendalian internal, strategi dan alokasi sumber daya, kinerja, pandangan, dan dasar persiapan dan presentasi. Tergantung pada informasi yang diberikan dalam laporan tahunan, item pengungkapan total untuk IR akan berubah untuk setiap organisasi. Menurut sistem IR, jumlah total informasi yang harus dimasukkan dalam laporan tahunan adalah 150.

Teknik dikotomis digunakan untuk menghitung pelaporan terintegrasi. Jika perusahaan mempublikasikan informasi yang dirujuk dalam laporan tahunan, setiap item pelaporan terintegrasi dalam instrumen penelitian ini diberi nilai 1 dan informasi yang tidak dibagikan sama sekali akan mendapat skor 0. Hal ini sesuai dengan pedoman dalam kerangka pelaporan terintegrasi *International Integrated Reporting Council* (IIRC).

Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

281

Sistem tata kelola perusahaan yang baik menggunakan proses tata kelola perusahaan dalam bisnis. Prosedur tata kelola perusahaan yang baik dapat diterapkan dalam dua cara: dengan satu ukuran dan dengan daftar indikator tata kelola perusahaan yang berlaku di seluruh organisasi. Berbagai penelitian menggunakan berbagai pendekatan untuk mengukur kualitas tata kelola perusahaan dengan menggunakan satu metrik, seperti jumlah komite audit, jumlah direksi di dewan komisaris, jumlah komite di bawah dewan komisaris, dan jumlah komite independen. Metode lain adalah dengan melakukan analisis isi dari indikator tata kelola perusahaan yang sangat baik yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, independensi komite audit, keragaman gender, kepemilikan independen, dan kepemilikan institusional semuanya digunakan dalam penelitian ini sebagai indikator tata kelola perusahaan yang baik (Cooray et al., 2020).

Nilai Perusahaan (*Firm value*)

Nilai perusahaan adalah metrik ekonomi secara keseluruhan yang dimiliki oleh perusahaan untuk menunjukkan nilai pasar perusahaan jika dijual. Proxy yang digunakan untuk menghitung nilai perusahaan sangat berbeda adalah *Price to Book Value* (PBV) digunakan sebagai proksi untuk menilai nilai perusahaan dalam penelitian ini (Cortesi & Vena, 2019).

RESULTS AND DISCUSSIONS

Statistik Deskriptif

Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari website masing-masing BUMN yang dijadikan sampel berupa laporan tahunan yang dirilis antara tahun 2018 hingga 2020. Selama kurun waktu tersebut, jumlah BUMN yang merilis laporan tahunan terintegrasi sebanyak tiga pada tahun 2017, empat pada tahun 2018, dan tiga pada tahun 2020. Secara umum, setiap perusahaan telah mengeluarkan laporan tahunan yang memuat laporan keberlanjutan. Penelitian ini berfokus pada penggunaan komponen laporan terintegrasi berdasarkan indeks GRI G4 (*Global Reporting Initiative G4 content index*), yang dibuat sejalan dengan kerangka kerja IR di seluruh dunia yang dikeluarkan oleh IIRC pada tahun 2013.

Statistik deskriptif berusaha menggambarkan sebaran statistik data yang akan dijadikan acuan dalam menjelaskan hasil analisis pengujian hipotesis penelitian. Tabel berikut adalah statistik deskriptif untuk delapan variabel.

Variabel	Min	Max	Mean	Std. Dev
IR	33	142	69,75	23,05
SDD	3	12	6,93	2,17
SDK	3	10	6,3	1,54
IIA	3	10	3,95	1,18
GD	0	1	0,37	0,48
KI	0	1	0,41	0,36
KM	0	0,39	0,02	0,06
PBV	-1058	6703	1411	1635
N	60			

Table 1.
Statistik
Deskriptif

Sumber: Data diolah (2022)

Hasil statistik deskriptif terdiri atas nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan deviasi standar. Salah satu indikator penyebaran data dapat dilihat pada nilai deviasi standar. Semakin rendah nilai deviasi standar mengindikasikan bahwa data cenderung mendekati nilai rata-rata dari data tersebut. Data dalam penelitian ini secara keseluruhan mempunyai nilai deviasi standar yang cenderung rendah dengan rentang antara 0,06 dan 1.635.

Statistik deskriptif untuk variabel IR memiliki nilai minimum 33 dan nilai maksimum 142 dengan nilai rata-rata 69,75. Hasil ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan yang cukup tinggi antara nilai terkecil sebagai nilai minimum dan nilai terbesar untuk nilai maksimum. Hal ini mengindikasikan bahwa pengungkapan IR oleh perusahaan BUMN masih dibawah 50%, hal ini terlihat dari rata-rata pengungkapan yang dilakukan adalah sebanyak 69,75. Pembahasan lebih lanjut terkait dengan hasil ini akan dibahas pada bagian pembahasan hasil analisis.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda yang mensyaratkan bahwa model regresi yang digunakan harus memenuhi persyaratan BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*). Sehingga sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Uji asumsi klasik dilakukan pada seluruh model persamaan regresi yang merepresentasikan hipotesis dalam penelitian ini.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui residual tersebut berdistribusi normal adalah dengan melakukan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* (uji K-S). Data dikatakan berdistribusi normal apabila Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0.05. Tabel 2 berikut menyajikan hasil uji normalitas untuk empat model regresi.

Integrated Reporting	
Standard deviation	19,39
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,20

Table 2.
Uji Normalitas
(One-Sample
Kolmogorov-
Smirnov)

Sumber: Data diolah (2022)

Hasil uji K-S menunjukkan bahwa seluruh residual pada model regresi berdistribusi normal, hal ini ditunjukkan dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada model lebih besar dari 0,05 (0,20). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah normalitas

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada tidaknya korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. *Variance Inflation Factor* (VIF) atau nilai tolerance menunjukkan ada tidaknya gejala multikolinearitas dalam model regresi. Jika model regresi memiliki skor VIF 10 atau nilai toleransi lebih dari 0,10 maka dianggap bebas dari gejala multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas untuk keempat model regresi ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Model Reg	Tolerance	VIF
SDD	0,299	3,340
SDK	0,297	3,367
IKA	0,746	1,341
GD	0,701	1,426
KI	0,818	1,223
KM	0,923	1,083
PBV	0,835	1,198

Table 3.
Nilai Variance
Inflation Factor
(VIF)

Sumber: Data diolah (2022)

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa tidak ada satu variabel independen yang mempunyai nilai VIF > 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala multikolinearitas, karena tidak adanya korelasi antar variabel independen dalam model penelitian.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 pada model regresi. Autokorelasi tidak akan berakibat pada konsistensi koefisien regresi tetapi pada standar errornya yang akan menjadi lebih rendah daripada yang sesungguhnya. Akibatnya koefisien regresi menjadi lebih signifikan atau ada kecenderungan untuk menolak Ho. Autokorelasi dapat diuji dengan Durbin-Watson (DW) Test. Model regresi dikatakan bebas dari autokorelasi apabila nilai statistik DW berada diantara du dan 4-du atau $du < dw < 4-du$. Tabel 4 berikut menyajikan hasil uji autokorelasi untuk empat model regresi.

Table 4.

Uji Autokorelasi (Durbin-Watson Test)

<i>Durbin Watson</i>	2,127
Du	1,851
4-du	2,149

Sumber: Data diolah (2022)

Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai statistik DW dari model regresi tersebut berada diantara nilai du dan 4-du. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh model regresi dalam penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini untuk menguji secara empiris pengaruh dari *good corporate governance* dan nilai perusahaan terhadap penerapan *integrated reporting*. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

	Koefisien (B)	t Statistik	P-value		t Statistik	P-value
Cons t	43,015	4,651	0,00			
SDD	-6,237	-2,393	0,02	<i>GCG</i>	2,388	0,017
SDK	2,878	0,785	0,43	<i>PBV</i>	2,643	0,008
IIA	8,617	3,431	0,00			
GD	-20,687	-3,365	0,00			
KI	-17,262	-1,988	0,05			
KM	44,569	1,081	0,28			
PBV	2,595	2,002	0,05			
N	60			N	60	
F (Sig)	5,095 (0,00)					
Adj R²	0,327			Adj R²	0,235	

Table 5.

Hasil Pengujian Hipotesis (IR sebagai Variabel Dependen)

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan pada hasil analisis regresi berganda yang ditampilkan pada table 5 menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) yang diukur dengan indikator ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, independensi komite audit, *gender diversity*, kepemilikan independen, kepemilikan institusi secara keseluruhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan IR yang dapat dilihat dari nilai *P-value* lebih kecil dari 0,05, kecuali untuk indikator

kepemilikan manajerial dan ukuran dewan komisaris. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa GCG berpengaruh signifikan terhadap penerapan IR pada perusahaan BUMN dapat diterima. Hasil ini juga didukung ketika dilakukan pengujian secara path analysis untuk pengaruh GCG terhadap IR, Adapun hasilnya dapat dilihat pada hasil bootsratping dengan *SmartPLS* berikut ini:

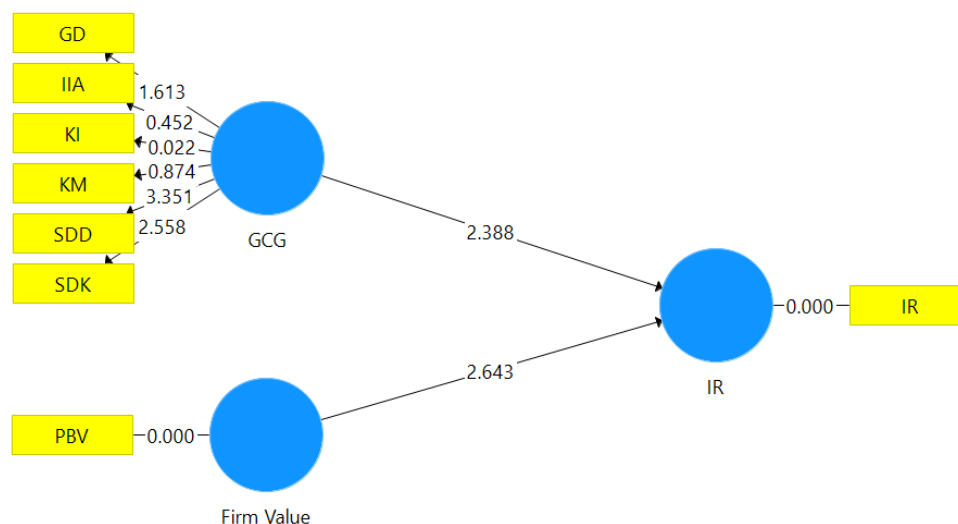


Figure 2. Hasil Analisis dengan Bootstrapping

Sumber: Data diolah (2022)

Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap IR, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini yang dapat diterima karena nilai P-value sebesar $0,017 < \alpha 0,05$. Hipotesis yang menyatakan bahwa nilai perusahaan berpengaruh positif terhadap IR juga dapat diterima karena nilai P-value sebesar $0,008 < \alpha 0,05$. Nilai adjusted R2 yang diperoleh dengan menggunakan analisis regresi sebesar 0,327 yang berarti bahwa 32,7% variasi variabel IR mampu dijelaskan oleh variabel GCG dan Firm Value, sisanya sebesar 67,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Good Corporate Governance terhadap Penerapan IR

Good corporate governance diharapkan dapat mendorong manajemen untuk menerapkan segala aturan yang berlaku sehingga perusahaan akan melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan yang disyaratkan oleh regulator. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh terhadap *integrated reporting*. Sejalan dengan teori keagenan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sesuai dengan kerangka yang dibuat oleh regulator dalam bentuk penerapan *integrated reporting*. Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Stacchezzini et al., 2016) yang menunjukkan bahwa *good corporate governance* berusaha untuk selalu mendorong pihak manajemen untuk melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan format yang dibuat oleh regulator.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang memproyeksikan *good corporate governance* yang berpengaruh terhadap penerapan *integrated reporting* terdiri atas ukuran dewan direksi independensi komite audit, keragaman gender, dan kepemilikan institusional. Ukuran dewan direksi dalam suatu perusahaan dapat menjadi penentu dalam kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Tabel 5 menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap penerapan *integrated reporting*. Dalam hal ini terjadi penurunan jumlah dewan direksi selama periode pengamatan dalam penelitian ini. Walaupun jika dilihat dari fungsinya, dewan direksi sebagai penentu kebijakan dan harus mampu untuk mengambil kebijakan yang

tepat dalam pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan sumber daya perusahaan untuk jangka pendek dan jangka panjang, termasuk dalam hal ini penentuan kebijakan dalam penerapan *integrated reporting*. Tugas direksi dengan adanya *integrated reporting* yaitu adanya pelaporan yang terintegrasi, adalah memudahkan dalam pengambilan keputusan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan di masa mendatang (Hapsari et al., 2019). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Higgins et al. (2019) yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi dapat mempengaruhi penerapan *integrated reporting* pada perusahaan, sehingga dengan keberadaan dewan direksi mampu meningkatkan kekuatan manajerial yang berfokus pada pelaporan sehingga akan memudahkan dalam penerapan *integrated reporting*.

Indikator independensi komite audit yang memiliki tugas untuk menyampaikan saran kepada komisaris perusahaan, terutama dalam hal yang terkait dengan pelaporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh direksi kepada komisaris, yang berarti bahwa dengan adanya komite audit yang independe dapat mendukung perusahaan dalam mempublikasikan *integrated reporting*. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa independensi komite audit berpengaruh positif terhadap penerapan *integrated reporting*. Pada data dalam penelitian ini, bahwa rata-rata perusahaan sudah menerapkan peraturan yang ditetapkan OJK tahun 2015 melalui peraturan Nomor 55 yang mengatur tentang keberadaan minimal komite audit adalah tiga orang. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa komite audit dapat mempengaruhi laporan tahunan yang menggunakan *integrated reporting* (Agyei-Boapeah et al., 2019; Hapsari et al., 2019; Levillain & Segrestin, 2019). Independensi komite audit sesuai dengan tugasnya diharapkan dapat meminimalisir kejadian negatif yang mungkin dilakukan manajemen sehingga dapat menurunkan permasalahan keagenan (Pranesti & Kusuma, 2021).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan kerangka *integrated reporting* di perusahaan merupakan informasi yang harus segera diungkapkan kepada publik dan hal ini merupakan dasar dari *signalling theory*. Perusahaan merasakan perlu untuk segera menunjukkan kepada stakeholders bahwa mereka mengikuti perkembangan informasi yang ada di dunia. *Good corporate governance* dianggap bisa menjadi *booster* untuk pelaporan keuangan perusahaan sesuai dengan perkembangan yang ada dan sejalan dengan teori legitimasi (*legitimation theory*). Legitimasi perusahaan bisa tetap terjaga dan semakin membaik ketika mekanisme *good corporate governance* berhasil mendorong manajemen untuk melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan yang dibutuhkan stakeholders. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Frias-Aceituno et al., 2013) di mana tujuan utama perusahaan untuk melakukan pelaporan keuangan terutama untuk mempertahankan legitimasinya, sehingga dewan direksi akan berusaha mendorong manajemen untuk melaporkan laporan tahunannya sesuai dengan kerangka *integrated reporting*.

Secara keseluruhan bahwa tidak semua indikator *good corporate governance* mampu mempengaruhi perusahaan untuk membuat keputusan dalam penerapan *integrated reporting*. Proses penyusunan laporan terintegrasi merupakan bagian mutlak dari manajemen perusahaan, sehingga indikator *good corporate governance* seperti kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi dan komite audit memiliki hubungan yang saling terkait, yaitu dewan direksi menjadi penanggung jawab dalam laporan keuangan yang mempengaruhi penerapan *integrated reporting*, komite audit sebagai pengawas dalam pekerjaan direksi dan kepemilikan institusional sebagai pengawas manajemen untuk mencegah perilaku menyimpang oleh manajemen dalam hal pengawasan pada pengungkapan informasi yang masih bersifat sukarela (Kılıç & Kuzey, 2018; Sari & Sukoharsono, 2013).

Nilai Perusahaan terhadap Penerapan IR

Pelaporan keuangan secara terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan karena secara teoretis dapat dipahami bahwa laporan keuangan yang disajikan secara menyeluruh untuk mencapai tujuan perusahaan akan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi. Hal ini pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan juga diharapkan bisa menunjukkan bagaimana mereka mengelola seluruh sumber daya yang dimilikinya sehingga tujuan perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan dapat dipenuhi. Artinya investor mengharapkan manajemen perusahaan akan mengungkapkan dengan transparan uang yang sudah diinvestasikan dimanfaatkan ke dalam bentuk apa saja oleh manajemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan terintegrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cortesi and Vena (2019) dan Barth et al. (2017) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki nilai yang baik akan mampu dalam mengembangkan model bisnisnya untuk tujuan jangka panjang dan dapat mendorong perusahaan dalam menerapkan pelaporan yang terintegrasi. Macias and Farfan-Lievano (2017) menunjukkan hasil yang sama bahwa dengan melakukan penerapan *integrated reporting* dapat dijadikan sebagai strategi perusahaan untuk dapat menarik modal baru guna membiayai tujuan keberlanjutan perusahaan dan sebagai strategi untuk mengatasi risiko yang akan dihadapi perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Hasil penelitian yang didapatkan sesuai dengan *signalling theory* karena pelaporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan merupakan sinyal baik bagi para investor sehingga akan meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap perusahaan. Pelaporan keuangan ini juga harus tepat waktu dan didapat oleh seluruh pemangku kepentingan karena berkaitan dengan legitimasi (*legitimation theory*) perusahaan di mata stakeholders. Diduga pelaporan keuangan sesuai dengan kerangka *Integrated Reporting* mungkin dipertimbangkan oleh investor institusi sehingga *integrated reporting* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Kesiapan BUMN dalam Menerapkan IR

Gambar 3 berikut ini mengilustrasikan perbandingan nilai IR pada dua puluh perusahaan BUMN selama periode tahun 2018 sampai dengan 2020. Nilai IR menunjukkan tingkat kesesuaian dari pelaporan perusahaan terhadap IR *framework*. Semakin besar nilai atau persentase yang diperoleh, maka semakin besar pula kesiapan perusahaan menerapkan IR.

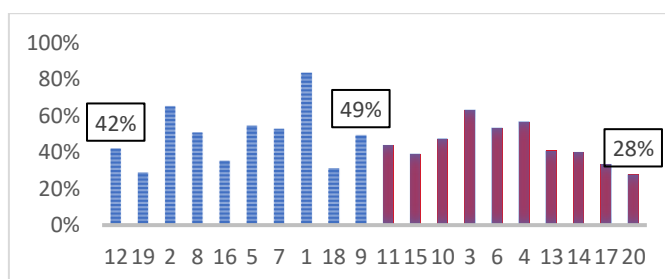


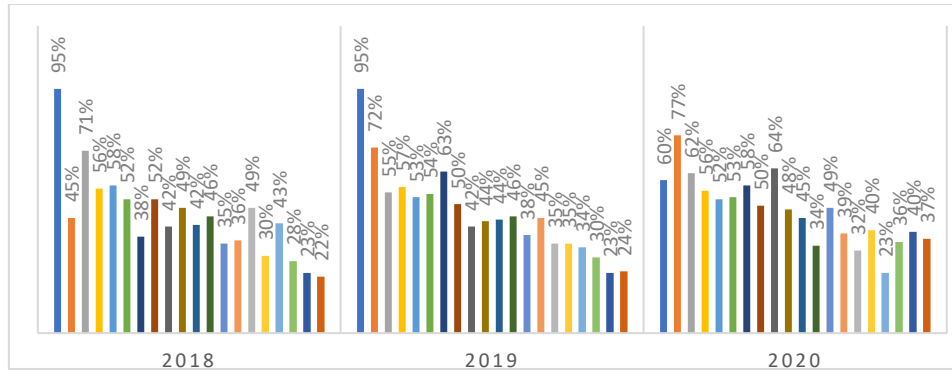
Figure 3.
Perbandingan Nilai IR pada Perusahaan BUMN

Sumber: Data diolah (2022)

Hasil analisis yang ditunjukkan pada gambar 3 menjelaskan tentang perbandingan nilai IR secara rata-rata selama tahun 2018 sampai dengan 2020. Pada gambar tersebut menunjukkan nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah dengan interval berkisar antara 83% sampai dengan 28%. Nilai tertinggi sebesar 83% menginterpretasikan bahwa perusahaan sudah siap dalam menerapkan IR. Nilai terenda sebesar 28% menginterpretasikan bahwa perusahaan tidak siap dalam menerapkan IR. Berdasarkan hasil tersebut, dua puluh perusahaan BUMN berada pada kategori siap sampai dengan tidak siap dalam menerapkan IR.

Analisis lebih lanjut dilakukan dengan membandingkan penerapan IR setiap tahun pengamatan. Hal ini bertujuan untuk dapat lebih menjelaskan apakah terdapat konsistensi perusahaan BUMN dalam menerapkan IR, hasil ini dapat ditunjukkan dengan menganalisis trend kenaikan atau penurunan jumlah pengungkapan pada perusahaan selama tahun pengamatan. Adapun hasil analisis ini dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini.

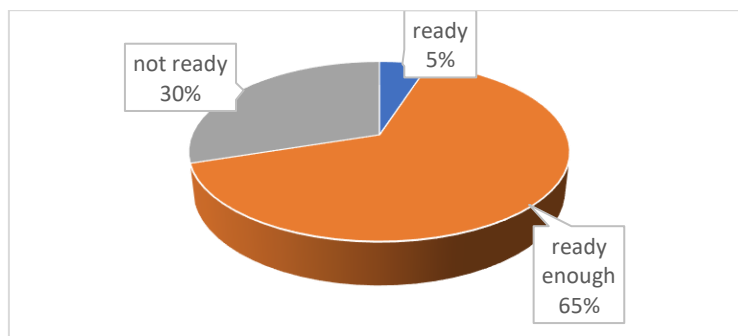
Figure 4.
Perbandingan
Nilai IR pada
Perusahaan
BUMN tahun
2018,2019, dan
2020



Sumber: Data diolah (2022)

Hasil analisis yang ditunjukkan pada gambar 4.3 tersebut menunjukkan bahwa trend penerapan IR dari tahun 2018 sampai dengan 2020 bervariasi pada setiap perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kenaikan dan penurunan jumlah yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Seperti yang ditunjukkan pada analisis di tahun 2018 dan 2019, untuk perusahaan A jumlah pengungkapannya sebesar sebesar 95% sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan pengungkapan yaitu sebesar 60%. Hasil ini menjelaskan bahwa perusahaan telah siap untuk menerapkan IR, walaupun di tahun 2020 jumlah pengungkapannya menurun tetapi masih dalam kategori cukup siap. Selain itu, terdapat perusahaan yang memiliki peningkatan jumlah pengungkapan IR dari tahun 2018 sampai dengan 2020 yaitu perusahaan B dengan masing-masing jumlah pengungkapan selama tahun 2018 sampai dengan 2020 sebesar 45%, 72% dan 77%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sudah siap dalam menerapkan IR dalam pelaporan tahunannya.

Figure 5.
Indikasi
kesiapan
perusahaan
dalam
implementasi IR



Sumber: Data diolah (2022)

Gambar 5 menunjukkan perbandingan proporsi rata-rata dua puluh perusahaan BUMN terkait dengan kesiapan menerapkan IR. Berdasarkan hasil analisis tersebut bahwa hanya sebesar 5% atau 1 perusahaan yang siap dalam menerapkan IR, sebesar 65% atau 13 perusahaan yang tergolong cukup siap dalam menerapkan IR, dan sebanyak 30% atau 6 perusahaan yang tidak siap menerapkan IR. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat potensi untuk mengembangkan pelaporan lebih lanjut untuk 14 perusahaan dalam menerapkan IR dalam pelaporan tahunannya. Sedangkan sebanyak 6 perusahaan yang tergolong tidak siap

dalam menerapkan IR yang berarti bahwa perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap pelaporan tahunan atas pengungkapan IR dalam pelaporannya.

289

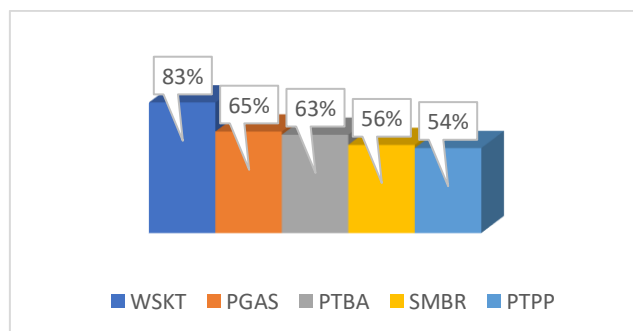


Figure 6. Indikasi rata-rata kesiapan 5 BUMN dengan nilai IR tertinggi dalam implementasi IR

Sumber: Data diolah (2022)

Gambar 6 menunjukkan lima perusahaan yang memiliki kesesuaian pelaporan yang paling tinggi terhadap IR dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Lima perusahaan tersebut mencakup WSKT (83%), PGAS (65%), PTBA (63%), SMBR (56%), dan PTPP (54%). WSKT dan PTPP bergerak pada sektor konstruksi, PTBA bergerak pada sector pertambangan, SMBR dan PGAS pada sector industri pengolahan. Kelima perusahaan tersebut memiliki nilai IR lebih dari 50% dan tergolong cukup siap untuk menerapkan IR. Hal ini berarti perusahaan dapat mengembangkan lebih lanjut dalam menerapkan IR dalam pelaporan tahunannya.

Jika diperhatikan dari kelima perusahaan tersebut yang memiliki jumlah pengungkapan IR lebih dari 50% rata-rata jenis perusahaan yang terlibat langsung dengan lingkungan. Isu mengenai dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan alam dan lingkungan social menjadi dasar dalam pengembangan teori akuntansi yang terkait dengan akuntansi lingkungan hidup dan lingkungan social. Selain hasil yang ditunjukkan pada penelitian ini, bukti lain yang terkait dengan isu akuntansi lingkungan ini menitikberatkan pada industri ini adalah keterlibatan profesi akuntansi yang menggunakan pendekatan mandatori yang mewajibkan perusahaan yang operasinya berpotensi besar sebagai penyebab kerusakan lingkungan alam, sehingga untuk pengakuan biaya yang terkait dengan pencabutan peralatan dan biaya reklamasi lahan sebagai biaya yang dikapitalisasi dalam nilai asset yang menyebabkan kerusakan tersebut. Di Indonesia kewajiban untuk mengkapitalisasi biaya-biaya ini dijelaskan dalam PSAK 16 yang mengatur tentang asset tetap dan hal ini paling sesuai untuk industri pertambangan juga pengolahan.

Pelaporan keuangan dengan kerangka *integrated reporting* dalam laporan tahunan di Indonesia yang masih bersifat sukarela (*voluntary*), sehingga perusahaan merasa tidak berkewajiban untuk mengikuti kerangka tersebut di dalam laporan tahunannya. Perusahaan lebih berfokus untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat wajib (*mandatory*), seperti laporan keuangan yang diwajibkan oleh regulator untuk dipublikasikan paling lambat 30 April setiap tahunnya. Walaupun perusahaan mengetahui tentang perkembangan terbaru dalam pelaporan keuangan, namun karena sifatnya masih sukarela, maka perusahaan cenderung memomorduakannya.

JRAK 12.2

Berdasarkan hasil analisis dan penjelasan-penjelasan yang dilakukan dalam penelitian ini dihasilkan sebuah konsep mengenai *good corporate governance* dan nilai perusahaan yang dapat dipengaruhi oleh *integrated reporting*. Perhatian khusus ditujukan untuk manajemen dalam penyusunan pelaporan keuangan yang mengikuti kerangka *integrated reporting*. Penerapan kerangka *integrated reporting* secara *mandatory* (wajib) juga memberikan tekanan kepada pihak

manajemen untuk menyusun laporan tahunannya sesuai dengan kerangka *integrated reporting*, hal inilah yang dimaksud dengan *integrated reporting implementation*. Pilihan implementasi, apakah secara *mandatory* atau *voluntary*, atas sebuah aturan disuatu negara akan membuat manajemen perusahaan memiliki pertimbangan yang berbeda. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak regulator yang terkait sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan terkait penerapan kerangka *integrated reporting* di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan *integrated reporting* dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh *good corporate governance* dan nilai perusahaan. Kerangka *integrated reporting* perlu untuk mulai diperhatikan dalam penyusunan laporan tahunan sehingga seluruh proses pembentukan nilai perusahaan dapat dibaca oleh seluruh stakeholders.

CONCLUSION

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan IR yang dihubungkan dengan tata kelola perusahaan dan nilai perusahaan. Hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan bahwa IR dapat diterapkan secara wajib atau sukarela pada BUMN di Indonesia. Berdasarkan pada hasil analisis yang menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan dan nilai perusahaan berpengaruh positif terhadap penerapan IR. Selain itu, berdasarkan hasil analisis deskriptif terkait dengan elemen IR yang telah diterapkan oleh perusahaan BUMN menunjukkan bahwa sebanyak 65% perusahaan BUMN cukup siap menerapkan IR dalam pelaporan tahunannya. Hal ini berarti bahwa perusahaan BUMN pada umumnya telah menerapkan elemen-elemen IR dalam pelaporan tahunannya, walaupun di Indonesia yang terkait dengan regulasi IR yang masih bersifat sukarela, tetapi perusahaan BUMN telah menyesuaikan pelaporan tahunannya dengan elemen-elemen IR framework, sehingga ketika Indonesia melakukan perubahan pada regulasi dalam pelaporan tahunan dengan mewajibkan seluruh perusahaan untuk menerapkan IR sebagai bentuk dari pelaporan tahunan perusahaan..

Kesiapan perusahaan BUMN dalam menerapkan IR dalam pelaporan tahunan juga didukung dengan adanya tata kelola perusahaan dan nilai perusahaan yang baik. Perusahaan yang memiliki nilai perusahaan dan tata Kelola perusahaan yang baik memiliki kesiapan yang lebih besar dalam menerapkan laporan tahunan yang terintegrasi. Oleh karena itu, kerangka IR perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan tahunan sehingga seluruh pembentukan tata kelola dan nilai perusahaan dapat dibaca oleh seluruh stakeholders. Semakin banyak perusahaan yang menerapkan IR dalam laporan tahunannya, maka diharapkan mampu untuk mengubah regulasi yang saat ini di Indonesia masih bersifat sukarela untuk penerapan IR dalam laporan tahunannya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan BUMN di Indonesia sudah cukup siap dalam menerapkan IR dalam laporan tahunannya.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah sampel yang hanya terbatas pada perusahaan BUMN yang belum sepenuhnya menerapkan *integrated reporting* dalam pelaporan perusahaan, sehingga data penelitian yang diperoleh tidak maksimal terkait dengan pengungkapan *integrated reporting*, sehingga hasil penelitian yang diperoleh menjadi tidak optimal dalam menjelaskan item-item *integrated reporting* dalam pelaporan perusahaan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel perusahaan yang secara penuh menggunakan *integrated reporting* dalam pelaporan perusahaan dengan variasi industri yang berbeda-beda, sehingga dapat diperoleh jumlah pengungkapan item *integrated reporting* yang lebih banyak dan dapat digeneralisasikan pada variabel yang sama yaitu *good corporate governance* atau variabel lain yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam penerapan *integrated reporting*.

Secara teoritis bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan tentang nilai perusahaan di laporan tahunan disarankan agar menggunakan data kapitalisasi pasar, dengan jumlah

sampel yang lebih banyak dan menggunakan kepemilikan saham institusi dalam perusahaan, return saham, ukuran perusahaan dan kebijakan dividen sebagai variabel penelitian. Penambahan variabel penelitian dalam model penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan nilai R-square sehingga model menjadi lebih baik. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat membandingkan penerapan IR di Indonesia yang masih bersifat sukarela dengan negara lainnya yang regulasi pelaporan tahunannya telah menerapkan IR secara wajib (mandatory), seperti negara-negara di Eropa.

Secara Praktis kepada manajemen perusahaan disarankan untuk mulai menerapkan kerangka integrated reporting dalam laporan tahunannya. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa informasi-informasi yang harus diungkapkan dalam pelaporan keuangan sesuai dengan integrated reporting framework lebih rinci, ringkas dan dapat mengungkapkan bagaimana proses peningkatan nilai berjalan di perusahaan. Di masa yang akan datang atau pada periode yang akan datang kerangka integrated reporting dalam laporan tahunan akan menjadi pertimbangan bagi para pelaku pasar modal dalam membuat keputusan terkait investasi.

REFERENCES

- Agyei-Boapeah, H., Ntim, C. G., & Fosu, S. (2019). Governance structures and the compensation of powerful corporate leaders in financial firms during M&As. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 37, 100285.
- Ahmad, R., & Sari, R. C. (2017). Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan Rerangka Integrated Reporting. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(2), 125-135.
- Alkausar, B., Kawakibi, F. B., & Lasmana, M. S. (2021). Corporate Governance And Tax Aggressiveness: Agency Theory Relationship. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 138-149.
- Azzahra, B. (2022). Adopsi Integrated Reporting : Strategi Korporasi Berkelanjutan Menuju Pencapaian SDG 2030. *ACCOUNTING GLOBAL JOURNAL*, 6(1), 78-103.
- Barth, M. E., Cahan, S. F., Chen, L., & Venter, E. R. (2017). The economic consequences associated with integrated report quality: Capital market and real effects. *Accounting, Organizations and Society*, 62, 43-64.
- Breliastiti, R. (2021). Penerapan Standar GRI sebagai Panduan Penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2020 Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer dan Non-Primer di Bursa Efek Indonesia. *JURNAL EKOBISMAN* 6(1), 138-1561.
- Camilleri, M. A. (2018). Theoretical insights on integrated reporting: The inclusion of non-financial capitals in corporate disclosures. *Corporate Communications: An International Journal*.
- Cooray, T., Gunarathne, A., & Senaratne, S. (2020). Does corporate governance affect the quality of integrated reporting? *Sustainability*, 12(10), 4262.
- Cortesi, A., & Vena, L. (2019). Disclosure quality under Integrated Reporting: A value relevance approach. *Journal of cleaner production*, 220, 745-755.
- Dosinta, N. F., Brata, H., & Heniwati, E. (2018). HARUSKAH VALUE CREATION HANYA TERDAPAT PADA INTEGRATED REPORTING? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 248-266.

- Farneti, F., Casonato, F., Montecalvo, M., & de Villiers, C. (2019). The influence of integrated reporting and stakeholder information needs on the disclosure of social information in a state-owned enterprise. *Meditari Accountancy Research*, 27(4), 556-579.
- Feng, T., Cummings, L., & Tweedie, D. (2017). Exploring integrated thinking in integrated reporting—an exploratory study in Australia. *Journal of Intellectual Capital*.
- Frias-Aceituno, J. V., Rodriguez-Ariza, L., & Garcia-Sanchez, I. M. (2013). The role of the board in the dissemination of integrated corporate social reporting. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 20(4), 219-233.
- Hapsari, D. W., Qashash, V., & Manurung, D. T. (2019). Implikasi Corporate Governance dalam Pelaksanaan Integrated Reporting pada BUMN Nonkeuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3).
- Higgins, C., Stubbs, W., Tweedie, D., & McCallum, G. (2019). Journey or toolbox? Integrated reporting and processes of organisational change. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.
- Ivan, O. R. (2018). Integrated reporting in the context of corporate governance. Case study on the adoption of integrated reporting of Romanian companies listed on BSE. *Valahian Journal of Economic Studies*, 9(2), 127-138.
- Kannenbergh, L., & Schreck, P. (2019). Integrated reporting: boon or bane? A review of empirical research on its determinants and implications. *Journal of Business Economics*, 89(5), 515-567.
- Kılıç, M., & Kuzey, C. (2018). Determinants of forward-looking disclosures in integrated reporting. *Managerial Auditing Journal*.
- Levillain, K., & Segrestin, B. (2019). From primacy to purpose commitment: How emerging profit-with-purpose corporations open new corporate governance avenues. *European Management Journal*, 37(5), 637-647.
- Macias, H. A., & Farfan-Lievano, A. (2017). Integrated reporting as a strategy for firm growth: multiple case study in Colombia. *Meditari Accountancy Research*.
- Menicucci, E. (2018). Exploring forward-looking information in integrated reporting: a multi-dimensional analysis. *Journal of Applied Accounting Research*.
- Perego, P., Kennedy, S., & Whiteman, G. (2016). A lot of icing but little cake? Taking integrated reporting forward. *Journal of cleaner production*, 136, 53-64.
- Pistoni, A., Songini, L., & Bavagnoli, F. (2018). Integrated reporting quality: An empirical analysis. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 25(4), 489-507.
- Pranesti, A., & Kusuma, I. W. (2021). The moderating effect of earnings management and dividend policy on relationship between corporate governance and institutional foreign ownership. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 11(3), 599-617.
- Roxana-Ioana, B., & Petru, S. (2017). Integrated reporting for a good corporate governance. *Ovidius University Annals*, 17(1), 424-428.
- Sari, A. R., & Sukoharsono, E. G. (2013). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komposisi Dewan Komisaris, Kinerja Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility di dalam Sustainability Report pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 11(3), 481-491.

- Schmidt, C., & Fahlenbrach, R. (2017). Do exogenous changes in passive institutional ownership affect corporate governance and firm value? *Journal of financial economics*, 124(2), 285-306.
- Stacchezzini, R., Melloni, G., & Lai, A. (2016). Sustainability management and reporting: the role of integrated reporting for communicating corporate sustainability management. *Journal of cleaner production*, 136, 102-110.
- Suttipun, M., & Bomlai, A. (2019). THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND INTEGRATED REPORTING: THAI EVIDENCE. *International Journal of Business & Society*, 20(1).
- Utami, K. (2016). Disclosure dan Cost of Capital: Implementasi Integrated Reporting di Asia Pasifik. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1-23.
- Velte, P., & Stawinoga, M. (2017). Integrated reporting: The current state of empirical research, limitations and future research implications. *Journal of Management Control*, 28(3), 275-320.
- Wulf, I., Niemöller, J., & Rentzsch, N. (2014). Development toward integrated reporting, and its impact on corporate governance: a two-dimensional approach to accounting with reference to the German two-tier system. *Journal of Management Control*, 25(2), 135-164.
- Zambon, S., Marasca, S., & Chiucchi, M. S. (2019). Special issue on “The role of intellectual capital and integrated reporting in management and governance: a performative perspective”. *Journal of Management and Governance*, 23(2), 291-297.